

PERSEPSI NELAYAN TERHADAP PRAKTIK *DESTRUKTIVE FISHING* DI WILAYAH PESISIR SAPE: ANALISIS TEMATIK MANUAL ALA NVIVO

[Fishermen's Perception Of Destructive Fishing Practices In The Sape Coastal Area: A Manual Thematic Analysis By Nvivo]

Ida Ayu Ketut Marini^{1)*}, Denianto Yoga Sativa²⁾

Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram

yumar4365@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi nelayan terhadap praktik destruktif fishing di wilayah pesisir Sape, Kabupaten Bima. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan instrumen kuesioner skala Likert lima poin. Data dianalisis menggunakan teknik tematik manual berbasis prinsip NVivo, yang mengelompokkan pernyataan ke dalam lima kategori: dampak ekologis, dampak sosial-ekonomi, pengetahuan hukum, sikap terhadap lingkungan, dan persepsi terhadap peran pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa nelayan memiliki kesadaran tinggi terhadap dampak *destruktive fishing*, baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi. Mereka juga menunjukkan sikap positif terhadap pelestarian lingkungan dan penegakan hukum, meskipun persepsi terhadap ketegasan pemerintah masih tergolong rendah. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata kunci: persepsi nelayan; destruktifve fishing; pesisir; NVivo manual; ekologi laut

ABSTRACT

This study aims to explore fishermen's perceptions of destructive fishing practices in the coastal area of Sape, Bima Regency. The method used was a descriptive approach using a five-point Likert scale questionnaire. Data were analyzed using a manual thematic technique based on NVivo principles, which grouped statements into five categories: ecological impacts, socio-economic impacts, legal knowledge, attitudes toward the environment, and perceptions of the government's role. The analysis results indicate that fishermen have a high awareness of the ecological and socio-economic impacts of destructive fishing. They also demonstrated a positive attitude toward environmental conservation and law enforcement, although perceptions of government assertiveness remained low. These findings provide important insights for formulating policies for community-based fisheries resource management.

Keywords: fishermen's perceptions; destructive fishing; coastal; NVivo manual; marine ecology

PENDAHULUAN

Permasalahan penangkapan ikan tidak bertanggungjawab yang kita kenal selama ini ialah illegal fishing atau penangkapan berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan populasi ikan. Selain itu ada juga penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destrutive fishing*). Aktivitas semacam ini tentunya dapat merugikan kelestarian ekosistem perairan.

Destruktif fishing merupakan cara penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau bahan beracun yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Menurut KKP, terdapat tiga jenis aktivitas destruktif fishing yaitu penangkapan ikan

dengann penggunaan racun potas (Cyanide fishing), penangkapan ikan dengan menggunakan bom(dynamite fishing), serta penangkapan ikan menggunakan strum.

Pada tahun 2013-2019 hasil temuan KKP menyatakan bahwa aktivitas pemboman ikan hamper terjadi diseluruh propinsi. Dari total 653 kasus yang ditemukan, ada beberapa wilayah yang paling rawan terjadinya *destruktive fishing*, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Aceh. Lebih anjut dijelaskan bahwa bom ikan dapat membuat kematian massal pada algae bersel satu yang hidup dalam jaringan tubuh karang. Algae tersebut bersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang sebagai penghasil oksigen dan nutrisi melalui proses fotosintesis. Dalam kondisi perairan yang baik, pembentukan 1 cm terumbu karang memerlukan waktu sekitar satu tahun, sehingga untuk pembentukan terumbu karang setebal 100cm memerlukan waktu sekitar 100 tahun. (Afrillia, 2022).

Praktik *destruktive fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia seperti penggunaan bom, racun dan alat tangkap tidak ramah lingkungan, menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan kelangsungan hidup nelayan taradisional. Di wilayah pesisir Sape, praktik ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Pemahaman persepsi masyarakat nelayan terhadap fenomena ini penting untuk merancang intervensi yang tepat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nelayan memahami dan menilai destruktif fishing, serta persepsi mereka terhadap peran pemerintah dan upaya pelestarian lingkungan.

Menurut FAO (2022), lebih dari 35% stok ikan global kini berada dalam status eksploitasi berlebihan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, menjadi wilayah yang paling terancam. Bila tidak ada langkah perlindungan yang tegas, bukan hanya ikan yang punah, tapi juga harapan akan laut yang lestari dan kehidupan yang berkeadilan.

Penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini Adalah “bagaimana persepsi masyarakat nelayan terhadap praktik penangkapan ikan yang terjadi di wilayah perairan Sape?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat nelayan terhadap praktik penangkapan ikan yang terjadi di wilayah perairan sape.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *kualitative deskriptif* dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan faktor-faktor pendorong terjadinya praktik destruktif fishing di perairan Sape. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Jenis data yang digunakan pada penelitian adalah data primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari responden dalam hal ini adalah masyarakat nelayan. Data di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik yang dibantu dengan teknik manual berbasis *software-assisted qualitative analysis* seperti NVivo. Setiap transkrip wawancara dikodekan secara manual, diklasifikasikan dalam kategori dan tema, untuk kemudian diinterpretasikan maknanya secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis secara manual dengnan menggunakan pendekatan coding tematik berbasis prinsip Nvivo didapatkan bahwa setiap pernyataan dikategorikan ke dalam lima utama: (1) Ekologis, (2) Sosial Ekonomi, (3) Pengetahuan Hukum, (4) Sikap Pelestarian, (5) Persepsi Pemerintah, seperti pada table di bawah ini.

Tabel 1. Analisis Pendekatan Coding Tematik Berbasis NVivo terhadap Pernyataan Nelayan di Perairan Sape (2025)

No	Pernyataan	Kategori
1	Destruktif fishing merusak habitat	Ekologis
2	Aktivitas destruktif fishing	Ekologis
3	Penggunaan alat tangkap yang	Ekologis
4	Destruktif fishing menyebabkan	Sosial
5	Kehidupan sosial masyarakat	Sosial
6	Destruktif fishing membuat	Sosial
7	Kerusakan lingkungan akibat	Ekologis
8	Penggunaan alat tangkap ilegal	Ekologis
9	Saya mengetahui bahwa destruktif	Pengetahuan
10	Saya mengetahui zona	Pengetahuan
11	Saya setuju bahwa masyarakat	Sikap
12	Saya mendukung adanya	Sikap
13	Saya mendukung adanya	Sikap
14	Pemerintah sudah cukup	Pemerintah
15	Saya merasa pemerintah kurang	Pemerintah
16	Bantuan alternatif alat tangkap	Pemerintah

Untuk membuat kategori persepsi masyarakat nelayan terhadap praktik penangkapan ikan yang terjadi di wilayah perairan Sape dengan membuat rentang skala seperti berikut:

Tabel. 2 Kategori Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Praktik Penangkapan Ikan

Rentang Skala	Kategori
50 - 89,99	Sangat Negatif
90 - 129,99	Negatif
130 - 169,99	Netral
170 - 209,99	Positif
210 - 250,00	Sangat Positif

Hasil Observasi Persepsi Masyarakat Nelayan Pada Aspek Ekologis Terkait Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Data hasil observasi persepsi nelayan pada aspek ekologi yang sudah di tabulasi dapat dilihat pada table 3 berikut.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat Pada Aspek Ekologi Terhadap Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Pernyataan	Aspek Ekologi	1	2	3	4	5	Jmlh Skor	Rata-rata Skor
1	<i>Destruktif fishing</i> (penggunaan bahan peledak dan beracun untuk menangkap ikan) merusak habitat laut, seperti terumbu karang.	8	16	15	48	85	172	3.44
2	Aktivitas <i>destruktif fishing</i> mengurangi jumlah ikan di perairan Sape.	0	6	30	132	20	188	3.76
3	Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mengancam keberlanjutan ekosistem laut	8	24	21	52	50	155	3.1
7	Kerusakan lingkungan akibat <i>destruktif fishing</i> menurunkan hasil tangkapan ikan	0	10	0	76	130	216	4.32
8	Penggunaan alat tangkap ilegal menyebabkan kerugian jangka panjang bagi nelayan	3	1	2	27	17	204	4.08
Rata-rata							187	3.74

Tabel 3 menjelaskan dari lima pernyataan terkait aspek ekologi pada penelitian ini diperoleh jumlah skor paling tinggi pada pernyataan bahwa kerusakan lingkungan akibat destruktif fishing dapat menurunkan hasil tangkapan ikan yaitu sebesar 216 dan paling rendah pada pernyataan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mengancam keberlanjutan ekosistem laut

sebesar 155. Namun demikian, rata-rata dari jumlah skor pada seluruh aspek ekologi diperoleh nilai skor sebesar 187. Nilai rata-rata ini termasuk ke dalam kategori positif, hal ini memberikan makna bahwa Masyarakat nelayan di perairan Sape memiliki persepsi yang positif terhadap aspek lingkungan seperti penggunaan peledak dan beracun akan dapat merusak habitat laut, terumbu karang, jumlah ikan akan berkurang, menurunkan hasil tangkapan dan akhirnya akan berujung pada kerugian jangka panjang bagi nelayan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwin, (2025) yang menyatakan bahwa aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan dengan metode yang merusak, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati di perairan terumbu karang, serta terganggunya keseimbangan ekosistem laut.

Hasil Observasi Persepsi Masyarakat Nelayan Pada Aspek Sosial Terkait Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Data hasil observasi persepsi nelayan pada aspek sosial yang sudah di tabulasi dapat dilihat pada table 4 berikut.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat Pada Aspek Sosial Terhadap Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Pernyataan	Aspek sosial	1	2	3	4	5	Jmlh Skor	Rata-rata Skor
4	<i>Destruktif fishing</i> menyebabkan konflik antar nelayan di Desa Bugis	5	14	3	96	65	183	3.66
5	Kehidupan sosial masyarakat terganggu akibat dampak destruktif fishing	0	12	0	120	70	202	4.04
6	<i>Destruktif fishing</i> membuat penghasilan nelayan menjadi tidak stabil	0	10	0	64	145	219	4.38
Rata-rata							201.33	4.03

Tabel 4 menjelaskan, ada 3 aspek sosial yang dipengaruhi oleh adanya praktik destruktif yang terjadi di perairan Sape meliputi adanya konflik antar nelayan, kehidupan sosial Masyarakat terganggu serta penghasilan nelayan menjadi tidak stabil yang masing-masing memiliki jumlah skor 183;202 dan 219 dengan rata-rata jumlah skor sebesar 201,33 hal ini tergolong kedalam kategori positif. Hal ini memberi pengertian bahwa Masyarakat nelayan pesisir Sape merasakan dampak sosial yang diakibatkan oleh adanya kegiatan destruktif Fishing terutama pada penghasilan nelayan.

Hasil Observasi Persepsi Masyarakat Nelayan Pada Aspek Pengetahuan Terkait Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Data hasil observasi persepsi nelayan pada aspek pengetahuan yang sudah di tabulasi dapat dilihat pada table 5 berikut.

Tabel 5. Persepsi Masyarakat Pada Aspek Pengetahuan Terhadap Praktik Destruktive Fishing di Perairan Sape (2025)

Pernyataan	Aspek Pengetahuan	1	2	3	4	5	Jmlh Skor	Rata-rata Skor
9	Saya mengetahui bahwa <i>destruktif fishing</i> dilarang oleh pemerintah.	0	6	0	72	145	223	4.46
10	Saya mengetahui zona penangkapan ikan yang dibuat oleh pemerintah	8	0	15	104	55	182	3.64
Rata-rata							202.5	4.05

Tabel 5 menjelaskan, bahwa masyarakat nelayan di perairan Sape memiliki pengetahuan tentang larangan praktik destruktif serta mengetahui tentang zona penangkapan yang dibuat oleh pemerintah tergolong positif, hal ini dapat dilihat dari jumlah skor pada aspek ini masing-masing 223 dan 182 dengan rata-rata jumlah skor sebesar 202,5.

Hasil Observasi Persepsi Masyarakat Nelayan Pada Aspek Sikap Terkait Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Data hasil observasi persepsi nelayan pada aspek sikap yang sudah di tabulasi dapat dilihat pada table 6 berikut.

Tabel 6. Persepsi Masyarakat Pada Aspek Sikap Terhadap Praktik *Destruktifve Fishing* di Perairan Sape (2025)

Pernyataan	Aspek Sikap	1	2	3	4	5	Jmlh Skor	Rata-rata Skor
11	Saya setuju bahwa masyarakat perlu lebih sadar akan dampak <i>destruktif fishing</i> terhadap lingkungan.	3	0	0	56	165	224	4.48
12	Saya mendukung adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan (laut)	0	0	0	56	180	236	4.72
13	Saya mendukung adanya penegakan hukum terhadap pelaku <i>destruktif fishing</i> .	3	6	3	40	165	217	4.34
Rata-rata							225.67	4.51

Tabel 6 menjelaskan bahwa masyarakat perlu lebih sadar lagi akan dampak paraktik destruktif fishing terhadap lingkungan, sangat mendukung adanya partisipasi dalam menjaga lingkungan serta perlunya penegakan hukum terhadap pelaku destruktif fishing. Hal ini terbukti dengan tinggi nilai jumlah skor pada ketiga pernyataan yang ada pada aspek sikap berturut-turut dari 224;236 dan 217 dengan rata-rata jumlah skor sebesar 225,67 tergolong kategori sangat positif.

Hasil Observasi Persepsi Masyarakat Nelayan Pada Aspek Pemerintah Terkait Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Data hasil observasi persepsi nelayan pada aspek pemerintah yang sudah di tabulasi dapat dilihat pada table 7 berikut.

Tabel 7. Persepsi Masyarakat Pada Aspek Pemerintah Terhadap Praktik Destruktif Fishing di Perairan Sape (2025)

Pernyataan	Aspek Pemerintah	1	2	3	4	5	Jmlh Skor	Rata-rata Skor
14	Pemerintah sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya <i>destruktif fishing</i>	2	0	18	112	70	202	4.04
15	Saya merasa pemerintah kurang tegas dalam menindak pelaku <i>destruktif fishing</i>	29	12	21	20	15	97	1.94
16	Bantuan alternatif alat tangkap yang ramah lingkungan dari pemerintah sudah cukup membantu masyarakat	20	2	39	48	20	129	2.58
Rata-rata							142.67	2.85

Tabel 7 menunjukan bahwa intervensi dari pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi adanya praktik destruktif fishing yang terjadi di perairan Sape. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai jumlah skor rendah yaitu 97 dan 129 dengan kategori negatif. Meskipun nelayan mengakui adanya edukasi dan bantuan alat tangkap, persepsi mereka terhadap ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku *destruktive fishing* tergolong rendah. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Persepsi negatif ini dapat menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum dan penguatan kebijakan konservasi apabila tidak segera ditanggapi dengan pendekatan yang lebih tegas dan transparan

Data Persepsi masyarakat Berdasarkan Kode Utama, Sub Kode, Skor Total , Skor Rata-rata dan Catatan Tematik

Tabel 7. Kode Utama, Sub Kode, Skor Total, Rata-rata Skor dan Catatan Tematik Responden

Kode Utama	Subkode	Skor Total (Simulasi)	Rata-rata Skor (Simulasi)	Catatan Tematik
Dampak Ekologis	Kerusakan habitat	172	3,44	Nelayan memahami dampak fisik destruktif fishing
Dampak Ekologis	Penurunan stok ikan	188	3,76	Penurunan jumlah ikan disadari oleh nelayan
Dampak Ekologis	Ancaman ekosistem	155	3,1	Nelayan menyadari kerusakan ekosistem
Dampak Sosial	Konflik horizontal	183	3,66	Terjadi konflik akibat praktik ilegal
Dampak Sosial	Gangguan sosial	202	4,04	Destruktif fishing ganggu sosial masyarakat
Dampak Ekonomi	Pendapatan tidak stabil	219	4,38	Pendapatan nelayan tidak menentu akibat kerusakan
Dampak Ekonomi	Hasil tangkapan menurun	216	4,32	Kerusakan lingkungan kurangi hasil tangkap
Dampak Ekonomi	Kerugian jangka panjang	204	4,08	Kerugian jangka panjang disadari nelayan
Pengetahuan Regulasi	Mengetahui larangan	223	4,46	Mayoritas nelayan tahu bahwa dilarang pemerintah
Pengetahuan Regulasi	Zona tangkap	182	3,64	Mengetahui adanya zona penangkapan
Kesadaran Lingkungan	Pentingnya kesadaran	224	4,48	Kesadaran pentingnya pelestarian tinggi
Kesadaran Lingkungan	Dukungan partisipasi	236	4,72	Masyarakat mendukung konservasi laut
Sikap terhadap Penegakan Hukum	Dukungan hukum	217	4,34	Mayoritas mendukung tindakan hukum
Persepsi terhadap Pemerintah	Edukasi masyarakat	202	4,04	Edukasi pemerintah dianggap sudah cukup
Persepsi terhadap Pemerintah	Kurang ketegasan	97	1,94	Banyak nelayan anggap pemerintah kurang tegas
Persepsi terhadap Pemerintah	Bantuan alat tangkap	129	2,58	Sebagian merasa bantuan alat cukup membantu

Berdasarkan hasil pengkodean tematik terhadap data wawancara, diperoleh lima kode utama yang merepresentasikan persepsi nelayan terkait praktik destruktif fishing, yakni: *dampak ekologis*, *dampak sosial*, *dampak ekonomi*, *pengetahuan terhadap regulasi*, *kesadaran lingkungan*, *sikap terhadap penegakan hukum*, dan *persepsi terhadap pemerintah* (Table 7) Masing-masing kode utama dijabarkan dalam beberapa subkode dengan perolehan skor total dan rata-rata yang mencerminkan intensitas atau kekuatan persepsi.

Dampak Ekologis

Tingkat kesadaran nelayan terhadap dampak ekologis akibat destruktif fishing menunjukkan nilai rata-rata skor yang bervariasi. Subkode *penurunan stok ikan* memperoleh skor rata-rata tertinggi (3,76), diikuti oleh *kerusakan habitat* (3,44), dan *ancaman ekosistem* (3,10). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar nelayan memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap dampak langsung dari *destruktifve fishing* seperti berkurangnya jumlah ikan dan kerusakan habitat laut, namun pemahaman terhadap konsekuensi ekologis yang lebih kompleks masih relatif rendah. Temuan ini sejalan dengan

penelitian (Putra et al., 2022) yang menyebutkan bahwa nelayan cenderung lebih mudah memahami dampak yang bersifat kasat mata dibandingkan dampak ekologis jangka panjang.

Dampak Sosial

Dalam aspek sosial, persepsi nelayan terhadap dampak destruktif fishing menunjukkan skor yang cukup tinggi, khususnya pada subkode *gangguan sosial* (4,04) dan *konflik horizontal* (3,66). Masyarakat pesisir mengalami secara langsung ketegangan sosial sebagai akibat dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini menegaskan bahwa dibalik potensi perikanan yang besar, praktik perikanan yang tidak bertanggung jawab, seperti destructive fishing, terus menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat pesisir. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yano, 2024 dalam artikelnya menyatakan bahwa selain dampak kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh destructive fishing juga berdampak pada ketidakstabilan sosial ekonomi yang sering kali memicu konflik antara kelompok nelayan dan antara negara yang berbatasan laut.

Dampak Ekonomi

Dimensi ekonomi menunjukkan persepsi paling tinggi dibandingkan dimensi lainnya. Subkode *pendapatan tidak stabil* memiliki skor rata-rata 4,38, diikuti oleh *hasil tangkapan menurun* (4,32) dan *kerugian jangka panjang* (4,08). Hal ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat destruktif fishing berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan ekonomi nelayan. Kesadaran ekonomi ini penting sebagai landasan untuk mendorong perubahan perilaku, karena nelayan cenderung lebih responsif terhadap risiko ekonomi yang bersifat langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Asmalinda, (2024) menyatakan bahwa penurunan kualitas terumbu karang dan mangrove akibat dari *destruktive fishing* dapat mengurangi hasil tangkapan ikan hingga mencapai 40% dalam satu decade serta dapat mengancam stabilitas ekonomi Masyarakat pesisir.

Pengetahuan Terhadap Regulasi

Nelayan menunjukkan tingkat pengetahuan yang cukup tinggi terhadap regulasi yang mengatur praktik penangkapan ikan. Subkode *mengetahui larangan destructive fishing* memperoleh skor rata-rata 4,46, menunjukkan bahwa mayoritas nelayan telah memahami bahwa penggunaan bom atau racun dilarang oleh hukum. Namun demikian, pada subkode *pengetahuan zona tangkap* hanya memperoleh skor 3,64, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan teknis mengenai wilayah tangkap yang legal masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pelanggaran tidak disengaja, sehingga perlu adanya penguatan edukasi teknis yang lebih kontekstual dan partisipatif.

Menurut Asmalinda, (2024) menyatakan bahwa kerusakan ekosistem pesisir memiliki dampak nyata pada keberlanjutan ekonomi komunitas nelayan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan konservasi yang lebih kuat, pengelolaan berbasis ekosistem dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kelestarian ekosistem.

Kesadaran Lingkungan

Kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya laut menunjukkan skor rata-rata tertinggi dibandingkan kode lainnya. Subkode *dukungan partisipasi masyarakat* memperoleh skor 4,72 dan *pentingnya kesadaran lingkungan* sebesar 4,48. Hal ini merupakan temuan yang sangat positif, yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Tingginya partisipasi ini menjadi fondasi penting dalam pendekatan *co-management* pengelolaan perikanan.

Sikap Terhadap Penegakan Hukum

Mayoritas responden menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum terhadap pelaku *destruktive fishing*, dengan skor rata-rata 4,34. Sikap positif ini menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap tindakan tegas pemerintah, asalkan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa, peran serta masyarakat khususnya nelayan sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan praktik illegal fishing (Maya dan Edy, 2023)

Lebih lanjut di nyatakan oleh Fadly (2023) bahwa terdapat lima kewenangan yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam mencegah penangkapan ikan yang merusak yaitu peraturan perundangan yang berlaku secara baku, memiliki pengawasan yang terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan pendekatan secara persuasif kepada mantan pelaku agar tidak melakukan penangkapan ikan yang merusak, menyediakan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa factor yang menjadi penghambat pemerintah dalam Upaya menanggulangi kegiatan *destruktive fishing* adalah (a) Adanya penjualan bahan baku *destruktive fishing* secara bebas,(b) Kurangnya kesadaran nelayan sebagai pelaku *destruktive fishing* (Imam Suyitno,2024).

Persepsi Terhadap Pemerintah

Persepsi terhadap peran pemerintah menunjukkan hasil yang campuran. Subkode *edukasi masyarakat* memperoleh skor cukup tinggi (4,04), menandakan bahwa sebagian besar nelayan menilai upaya edukasi sudah berjalan. Namun, subkode kurangnya ketegasan pemerintah memperoleh skor paling rendah di seluruh kategori (1,94), dan bantuan alat tangkap memperoleh skor moderat (2,58). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dianggap belum konsisten dalam implementasi aturan dan kurang merata dalam memberikan bantuan.

Menurut Rochman Nurhakim, (2025) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP rutin melakukan patroli laut, menangani pelanggaran administratif, hingga melakukan penyidikan pidana perikanan. Sejak tahun 2020, pendekatan pengawasan juga diperketat dengan pemanfaatan teknologi seperti: Vessel Monitoring System(VMS), overlay VMS dengan Automatic Identification System (AIS); Sistem pemantauan elektronik (e-monitoring) bidang kelautan dan perikanan; dan pelaporan hasil tangkapan elektronik(e-Logbook). Disamping itu, kerjasama pengawasan dengan mitra strategis baik dalam dan luar negeri juga terus ditingkatkan.

Menurut Kobul, dkk.,(2025) menyatakan bahwa dalam penanganan praktik destructive fishing yang terjadi selama ini masih adanya ego sektoral antar instansi dalam implementasi kerjasama antar Lembaga. kemudian belum terbentuk keselarasan aksi dan reaksi antar lembaga pada pencegahan kolaboratif, serta belum adanya strategi efektif dalam mengoptimalkan kemampuan masing-masing instansi dalam kegiatan pencegahan selama ini.

Pembahasan Tematik

Secara umum, analisis tematik menunjukkan bahwa persepsi nelayan terhadap destruktif fishing sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung terhadap dampaknya, terutama dalam dimensi ekonomi dan sosial. Tingginya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan dukungan terhadap penegakan hukum merupakan sinyal positif bagi intervensi berbasis komunitas. Namun demikian, persepsi negatif terhadap pemerintah terutama terkait kurangnya ketegasan perlu menjadi perhatian utama, agar strategi kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan efektif.

Visualisasi Word Cloud Berdasarkan Skor Persepsi Terhadap Isu Destruktif Fishing



Gambar 1. Visualisasi Word Cloud pada Persepsi Nelayan Terhadap Destructive Fishing di Perairan Sape

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa kata-kata dengan ukuran yang lebih besar mencerminkan tingkat persepsi atau perhatian yang lebih tinggi, sementara kata-kata dengan ukuran lebih kecil menunjukkan tingkat persepsi masyarakat yang lemah atau rendah. Dukungan Partisipasi Masyarakat pesisir Sape terhadap larangan praktik destructive fishing sangat positif untuk program konservasi laut serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kelestarian ekosistem laut. Masyarakat pesisir Sape rata-rata mengetahui bahwa praktik destruktive sepenuhnya dilarang oleh pemerintah dan mengakui akibatnya akan menyebabkan pendapatan mereka menjadi tidak stabil. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa hasil tangkapan nelayan semakin hari semakin menurun dan berujung pada kerugian jangka Panjang. Edukasi dari pemerintah sangat diharapkan untuk menurunkan gangguan sosial dan konflik horizontal yang terjadi di kalangan Masyarakat pesisir Sape, yang diakibatkan karena ketidak tahuan tentang pengetahuan zona penangkapan. Masyarakat pesisir Sape menilai selama ini pihak pemerintah dalam memberikan bantuan kurang adil hanya sebagian kecil yang merasakan dan kurang tegasnya pemerintah dalam menangani kasus destructive fishing yang telah terjadi di perairan Sape.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa mayoritas nelayan di kawasan pesisir, khususnya di wilayah Sape dan sekitarnya, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak negatif dari praktik *destruktive fishing*. Persepsi mereka mencerminkan pemahaman yang baik terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan, seperti menurunnya populasi ikan, rusaknya habitat laut, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem. Selain itu, nelayan juga merasakan langsung dampak sosial dan ekonomi dari praktik tersebut, antara lain berupa konflik antar nelayan dan ketidakstabilan penghasilan. Di sisi lain, mereka menunjukkan sikap positif terhadap pelestarian lingkungan dan penegakan hukum, serta menyatakan dukungan terhadap upaya edukasi dan pengawasan. Namun demikian, persepsi terhadap peran pemerintah masih menunjukkan ketimpangan, terutama terkait ketegasan dalam penindakan dan keberlanjutan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dengan demikian, persepsi nelayan dapat menjadi indikator penting dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Peningkatan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan
Pemerintah dan Lembaga terkait perlu memperluas program penyuluhan tentang bahaya destruktif fishing, zona penangkapan dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan melalui pendekatan berbasis komunitas.
2. Pelibatan aktif Masyarakat dalam pengawasan
Mendorong pembentukan atau penguatan kelompok pengawasan Masyarakat(Pokmaswas) untuk memnatau praktik penangkapan dan melaporkan pelanggaran secara kolektif.
3. Penegakan hukum yang tegas dan transparan
Aparat penegak hukum harus meningkatkan intensitas patrolidan penindakan terhadap pelaku destruktif fishing disertai dengan transparansi dalam proses hukum.
4. Evaluasi program bantuan pemerintah
Bantuan alat tangkap alternatif perlu dikaji ulang efektivitas dan kebermanfaatannya. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesesuaian alat dengan kondisi local dan melibatkan nelayan dalam perencanaan.
5. Pengembangan skema insentif untuk nelayan ramah lingkungan
Pemberian insentif seperti akses pasar khusus, subsidi alata tau label produk raamah lingkungan bagi nelayan yang berkomitmen terhadap konservasi.
6. Penguatan kolaborasi multi pihak
Diperlukan sinergi antara pemerintah, Lembaga penelitian, LSM dan Masyarakat local untuk mewujudkan system pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kolaboratif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillia, D. (2022). Destructive fishing, cara penangkapan ikan yang merugikan ekosistem perairan. Good News From Indonesia. Retrieved from <https://www.goodnewsfromindonesia.id>
- Asmalinda,S., Eni,K., Abdul R.,Widya, P. (2024). Pengaruh Kerusakan Ekosistem Terhadap Sumber Pendapatan Nelayan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.2 No. 12. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi>. Doi : <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1132>
- Darwin, (2025). Dampak Aktivitas Penangkapan Terhadap Keanekaragaman Hayati di Perairan Terumbu Karang. Jurnal Perikanan dan Kelautan. ISSN 3089-8803. Vol. 02 No.01, Juni 2025.
- Dao, Y., Yusnaldy, Kusuma. (2024). Penanggulangan Praktik Destruktive Fishing Melalui Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat. Buletin Ilmiah Marina <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra>
- FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. Rome: FAO. Food and Agriculture Organization
- Fadly, Kasnir, M.,Ihsan, Asbar. (2023). *Strategi for Countermeasures for Destructive Fishing in Makasar city Waters*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik.2024.
- Imam,S. Andi, A. A., Huria, M. (2024). Efek Destruktive Fishing Oleh Nelayan di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makasar. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.11 No.1.
- Kabol,S.R., Erry,H.,Fransisco,S. (2025). Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destruktive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Jurnal Sparta Multidiciplinary, Vol.1, No.1. <https://jurnal.patriotbangsapublisher.com/smj>
- Maya, S.,Eddy, R. (2023). Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Nelayan Sadar Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Illegal Fishing Menuju Keberlanjutan Sumber Daya Alam di Bidang Perikanan pada Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan. Vol. 7 No.2 <https://doi.org/10.23960/jss.v7i2.401>
- Rochman, N. (2025). Nelayan Terancam, Laut Terluka : Dampak IUU Fishing Bagi Masyarakat dan Ekosistem.
- Yunias, D. (2024). Destruktive Fishing: Ancaman Terhadap Keamanan Maritim dan Keberlanjutan Perikanan. Kumparan. Com.